

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Integrasi negara-negara Eropa yang berujung pada pembentukan Uni Eropa memiliki motif ekonomi yang sangat signifikan. Motif ekonomi integrasi di Eropa ini adalah keyakinan bahwa dengan pasar yang lebih besar dapat meningkatkan persaingan, yang akhirnya juga akan meningkatkan produktivitas dan standar hidup yang lebih tinggi. Ini didukung dengan kekuatan hubungan internasional telah berubah secara drastis pasca Perang Dingin, dunia diwarnai oleh polarisasi yang telah mendorong kawasan Dunia Berkembang dan Dunia Maju mempertegas kembali keberadaannya. Dengan perkembangan massif dari pertumbuhan ekonomi dunia yang tidak terkontrol, terdapat masalah-masalah lain yang timbul kemudian, masalah yang menyangkut utang luar negeri, pertumbuhan penduduk, macetnya arus modal, korupsi, pemerintahan yang tumpul yang dahulu hanya terjadi di bagian selatan dunia, sekarang mulai menggerogoti Uni Eropa.

Salah satunya adalah terjadinya krisis Yunani baru-baru ini, krisis ini memiliki implikasi pada stabilitas ekonomi di Eropa jika dibiarkan terlalu lama,. Dengan kata lain, krisis yang melanda Yunani memberikan dampak negatif pada perekonomian negara-negara yang khususnya tergabung dalam Uni Eropa. Kenyataan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, mengingat Yunani sebagai anggota Uni Eropa. Dampak krisis dan peran Uni Eropa dalam mengatasi krisis ekonomi Yunani tersebut sangat menarik untuk ditelusuri. Oleh sebab itu, melalui tulisan ini, penulis akan mencoba melakukan

penelusuran lebih jauh terkait upaya-upaya Uni Eropa dalam perannya yang memiliki posisi penting dalam perdagangan internasional untuk mengatasi kebangkrutan ekonomi Yunani.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan utama dari penulisan ini selain memang ketertarikan penulis tentang upaya Uni Eropa dalam mengatasi krisis ekonomi yang melanda Yunani. Terlepas dari itu alasan utama pemilihan judul ini adalah untuk sebagai gambaran awal dan sebagai tambahan pengetahuan tentang fenomena krisis ekonomi negara Yunani dan pengaruh Uni Eropa di dunia Internasional. Tujuan akhir dari penulisan ini dimaksudkan sebagai manifestasi dan implementasi dari penerapan teori yang pernah diperoleh penulis dibangku kuliah yang juga akan dijadikan Skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S-1 pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Krisis Eropa dimulai dengan kejatuhan perekonomian Negara anggota Uni Eropa yang dipicu oleh melonjaknya beban utang dan defisit fiskal negara anggota Uni Eropa. Keserakahan pemerintah di beberapa negara Eropa, seperti Yunani, Portugal, Irlandia, dan Spanyol sertapengelolaan budget pemerintah buruk, pengeluaran pemerintah yang dibiaya hutang amat boros. Semua sebab-sebab tersebut diatas membuat negara-negara tersebut kesulitan membayar hutang. Hal ini juga tidak didukung dengan lembaga pemberi hutang, yang mengetahui kondisi politik negara

tersebut tetapi tetap terus berani memberikan hutang pada pemerintah di negara negara tersebut.

Imbas dari itu semua membuat negara-negara ini mengalami kesulitan membayar hutang mereka. Kalau mereka gagal membayar hutang mereka akan ada banyak pihak pemberi hutang, yang akan menderita rugi besar. Yang juga akan menjalar ke pihak lain. Kesaling-terkaitan antara berbagai bank dan lembaga keuangan akan berdampak pada meluasnya dampak krisis keuangan ini ke banyak negara Eropa. Regionalism Unieropa yang sedari dahulu kuat perlahan mulai menemukan titik nadirnya

Negara yang paling merasakan akibat dari krisis ini adalah Yunani. negara ini sedang berjuang untuk menyelesaikan krisis moneter yang terjadi di negaranya. Meskipun memang tidak dapat dipungkiri bahwa ini juga merupakan imbas dari buruknya stabilitas ekonomi politik dunia yang menyebabkan krisis. Negara ini tengah berusaha menangani utang luar negeri yang semakin menumpuk. Ironisnya dari segi pendapatan negara ini termasuk kecil tapi dengan pengeluaran yang boros.

Dalam keanggotaan Unieropa, Yunani hanyalah sebuah negara kecil yang menyumbangkan sekitar 2,6% dari keseluruhan GDP di *Eurozone*, tetapi Yunani sebenarnya memiliki potensi investasi yang cukup menarik bagi para investor, namun krisis yang melanda daratan Eropa belakangan ini telah menimbulkan ketidakpercayaan para investor terhadap sektor keuangan di Eropa khususnya Yunani dan hal ini tentu akan memperparah krisis di Yunani dan jika krisis ini tidak ditanggulangi maka Yunani terancam benar-benar bangkrut.

Yunani adalah salah satu anggota Uni Eropa yang menggunakan mata uang Euro sehingga ketika salah satu negara anggotanya mengalami krisis dapat diperkirakan negara-negara lain khususnya yang menggunakan mata uang Euro akan terkena efek dari krisis ini secara langsung sejalan dengan Domino effect Theory yang sering digunakan oleh banyak ekonom untuk menggambarkan penyebaran krisis ekonomi di seluruh dunia.

Karena itu sangat menarik membahas peran Uni Eropa sebagai sebuah organisasi Internasional dan juga kerjasama regional di Eropa. Di skripsi ini penulis mencoba untuk mengelaborasi lebih lanjut tentang bagaimana peran Uni Eropa terhadap krisis di Yunani.

D. Rumusan Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penyusun dapat merumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana Peran Uni Eropa sebagai organisasi Internasional dalam mengatasi krisis yang melanda ekonomi Yunani tahun 2008-2014 ?”

E. Kerangka Dasar Teori

1. Teori Peranan

Menurut pendapat K.J. Holsti, konsep peran yang berhubungan dengan organisasi internasional, bahwa peranan merefleksikan kecenderungan pokok serta sikap terhadap lingkungan eksternal, terhadap variabel sistem, geografi dan ekonomi. Dalam teori peran perilaku individu harus dipahami dan dimaknai dalam konteks

sosial. Peran (role) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi. Baik posisi berpengaruh dalam organisasi maupun dalam sikap negara. Setiap orang yang menduduki posisi itu diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu. (Holsti, 1987)

Menurut John Wahlke, teori peranan memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Pertama, ia menunjukkan bahwa aktor politik pada umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Jadi kegiatan politik individu selalu ditentukan oleh konteks sosialnya. Kerangka berpikir teori peranan memandang individu sebagai seorang yang tergantung pada dan bereaksi terhadap perilaku orang lain. Kedua, teori peranan mempunyai kemampuan mendeskripsikan institusi secara behavioral. Dalam pandangan teorisasi peranan, institusi politik adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peranan. Model teori peranan langsung menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Dengan demikian teori peranan menjembatani jurang yang memisahkan pendekatan individualistic dengan pendekatan kelompok. Dalam kata lain institusi bisa didefinisikan sebagai serangkaian peran yang saling berkaitan yang berfungsi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan. (Holsti, 1987)

Teori peranan menegaskan bahwa "perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik". Teori ini berasumsi bahwa perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik. Dalam teori ini juga menjelaskan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma yang berlaku dalam peran yang

dijalankannya. Jadi kegiatan politik individu selalu ditentukan oleh konteks sosialnya.
(Mas'ood, 1989)

Dalam pengertian ini peranan dilihat sebagai suatu tugas atau kewajiban dan hak suatu posisi. Suatu posisi merupakan apa yang menjadi tujuan dari keberadaan organisasi itu. Mohtar Maso'ed juga menyatakan bahwa peranan adalah suatu organisasi. Secara umum peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi oleh organisasi tertentu dan harapan lingkungan sekitar terhadap keberadaan dari organisasi tersebut.

Mengacu pada hal diatas, peranan sangat terkait dengan fungsionalitas yang berhubungan erat dengan sejauh manakah fungsi dan kedudukan dapat diimplementasikan dalam perwujudan dilapangan. Dalam hal ini, tidak ada lagi kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan aturan-aturan, nilai-nilai yang melekat pada fungsi dan kedudukan tersebut.

Pada dasarnya, hukum Uni Eropa secara eksplisit tidak menyebutkan adanya kewajiban untuk membantu negara anggota yang mengalami permasalahan ekonomi. Beberapa perjanjian Uni Eropa, khususnya Perjanjian Maastricht melarang pemberian bailout (dana pinjaman) kepada negara anggota Eurozone (Zona Eropa). Bahkan Perjanjian Lisboa mengatur klausa tentang larangan bailout (dana pinjaman). Keputusan untuk memberikan bantuan kepada Yunani adalah keputusan yang kontroversial. Bailout (dana pinjaman) dilarang oleh Uni Eropa untuk mencegah negara anggota secara sengaja melanggar aturan yang ditetapkan dalam SGP dan dikhawatirkan bailout (dana pinjaman) yang diberikan pada satu negara akan

mendorong negara lain untuk mengajukan bailout (dana pinjaman). Akan tetapi, ada klausa pengecualian yaitu klausa pada pasal 122 Perjanjian Lisboa yang dapat dijadikan dasar bagi Uni Eropa untuk memberikan bantuan ekonomi kepada Yunani. Pasal 122 Perjanjian Lisboa mengenai fungsi Uni Eropa menyebutkan bahwa pemberian bantuan ekonomi memungkinkan untuk dilakukan tapi hanya apabila terjadi kondisi luar biasa.

Krisis Ekonomi Yunani dirasa dapat digolongkan sebagai kondisi luar biasa yang diatur oleh klausa ini.

“Apabila suatu negara anggota dalam kesulitan atau sangat terancam dengan kesulitan yang disebabkan oleh bencana alam atau kejadian luar biasa di luar kendali, Dewan, pada proposal dari Komisi, dapat memberikan, dalam kondisi tertentu, Union bantuan keuangan kepada negara anggota” (Valiante, 2011:45).

Alasan utama Uni Eropa menyelamatkan Yunani adalah karena Krisis Ekonomi Yunani telah berhasil mengancam stabilitas Uni Eropa dan menyebabkan kerentanan pada pemulihan ekonomi Eropa secara keseluruhan setelah terjadinya krisis finansial global pada tahun 2008. Sepanjang terjadinya Krisis Ekonomi Yunani, nilai euro terhadap dolar terus mengalami depresiasi. Salah satu peranan dari Uni Eropa memberikan bantuan penyelamatan bagi Yunani adalah untuk menghindari efek domino akibat Krisis Ekonomi Yunani ke negara-negara lain anggota Eurozone (Zona Eropa), khususnya negara-negara yang sedang berada di posisi ekonomi yang sulit seperti Irlandia, Italia, Portugal, dan Spanyol. Injeksi bailout (dana pinjaman) yang diberikan Uni Eropa tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban Yunani,

melainkan juga untuk menahan Irlandia, Italia, Portugal, dan Spanyol dari kejatuhan perekonomian.

Dengan memberikan bailout (dana pinjaman) kepada Yunani akan menjaga likuiditas Yunani, sehingga dapat memberikan waktu kepada Irlandia, Italia, Portugal, dan Spanyol untuk merekapitalisasi perbankan dan memangkas defisit. Namun dalam hal ini ada beberapa langkah konkrit Uni Eropa untuk menyelamatkan Yunani dari masalah utang dan defisit anggaran serta fiskal sangatlah diperlukan. Karena bila tidak segera dilakukan, akibatnya akan fatal yaitu dapat meruntuhkan kepercayaan para investor kepada Yunani secara khusus dan Uni Eropa secara umum dan hal itu sangat mengancam eksistensi negara dan regional. Uni Eropa memiliki tugas yang cukup berat, dimana pejabat kawasan ini harus bisa meyakinkan pasar atas pemecahan masalah defisit anggaran. Jika gagal mencari solusi atau masalah kian meningkat, pemodal akan semakin bertambah lari ke pasar (negara/kawasan) lain. Kondisi ini dapat menyebabkan tergantikannya posisi Uni Eropa sebagai kawasan dengan iklim usaha yang prospektif. Uni Eropa harus segera menerapkan sejumlah aturan dan menjaga kestabilan instrumen dan lembaga-lembaga mereka agar krisis tidak menyebar ke wilayah lain di dunia.

Melihat dampak buruk yang telah dan yang akan ditimbulkan oleh terjadinya krisis ekonomi Yunani, Uni Eropa tentunya terdorong untuk segera mengatasi krisis ekonomi yang mengancam eksistensi regionalnya tersebut. Hal yang mendorong Uni Eropa adalah:

Adanya kesadaran (awareness) dari Uni Eropa akan tanggung jawab moralnya sebagai organisasi regional yang telah menyatukan 28 negara di kawasan benua Eropa dalam satu mata uang tunggal yakni euro terkecuali bagi beberapa negara yang belum mau bergabung (negara non zona euro). Situasi ini dipahami oleh Uni Eropa, dan lembaga-lembaga keuangan untuk ikut terlibat dalam masalah krisis ekonomi tersebut.

Uni Eropa bertanggung jawab bagi negara anggotanya sebagai satu kesatuan. Apalagi setelah dibentuknya European Central Bank (Bank Sentral Eropa) dalam tubuh Uni Eropa yang memiliki tanggung jawab dalam masalah moneter negara zona euro serta adanya bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh ECB, IMF dan Uni Eropa melalui Economic Adjustment Programme (Program Penghematan Ekonomi), The European Financial Stability Facility dan The Stability and Growth Pact yang merupakan bentuk program Uni Eropa yang diterapkan untuk perekonomian Yunani.

Alasan kenapa Uni Eropa dan lembaga lainnya memilih untuk tidak membiarkan Yunani sebagai akar krisis ekonomi zona Eropa bangkrut adalah karena mereka telah terlibat jauh dan banyak lembaga keuangan Eropa turut menggelontorkan dananya. Jika Yunani tidak diselamatkan maka akan terjadi reaksi berantai dan turut meruntuhkan negara-negara lainnya di kawasan.

Uni Eropa tentu tidak ingin kehilangan citra (image) sebagai organisasi regional terbaik dunia yang pernah ada khususnya dengan sejumlah keberhasilan yang telah dicapai misalnya penyatuan mata uang sebagai pertanda full integration (integrasi keseluruhan) dan pembentukan Pasar Tunggal Eropa yang di dalamnya diatur penghapusan hambatan-hambatan dalam perdagangan di antara sesama negara anggota

Uni Eropa. Dicermati kebijakannya dalam berbagai hal seperti dalam hal pengambilan keputusan (decision making) karena keputusan ini merupakan suara bersama dari semua negara anggota. Untuk itu, Uni Eropa tentu berusaha untuk mengatasi krisis ekonomi Yunani meskipun itu mungkin dalam waktu yang cukup lama. Namun ada beberapa langkah program yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk mengatasi krisis ekonomi di Yunani, baik itu berupa kesepakatan yang dilakukan oleh ketiga troika (European Commission, European Central Bank and International Monetary Fund) dalam menjalankan programnya (Verney. 2009:77).

2. Konsep Organisasi Internasional

Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai :

“ Suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih Negara berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama para anggotanya”.(Yani, 2005)

Perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi internasional, telah makin menonjolkan peran organisasi internasional yang bukan hanya melibatkan Negara beserta pemerintah saja. Negara tetap merupakan aktor paling dominan didalam Bentuk-bentuk kerjasama internasional, namun perlu diakui eksistensi organisasi-organisasi internasional non-pemerintah yang makin hari semakin banyak jumlahnya.

Dengan demikian, Organisasi Internasional, akan lebih lengkap dan menyeluruh jika didefinisikan sebagai “Pola kerjasama yang melintasi batas-batas neagara, dengan

didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada Negara yang berbeda”. (Drs. Teuku May Rudy, 1993)

Perkembangan organisasi internasional merupakan kebutuhan yang timbul dari pergaulan Internasional dimana dituntut untuk dapat mengatur permasalahan yang muncul darinya (pergaulan Internasional). Isu perdamaian semakin berkembang seiring meningkatnya permasalahan internasioanal. Maka semakin penting peran organisasi internasioanal yang bertindak sebagai pihak ketiga untuk membantu Negara dalam menyelesaikan konflik yang dialami.

Menurut Holsti Administrasi dan Organisasi Internasional :

“Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku Negara-negara (state-actors), maupun oleh pelaku-pelaku buakan Negara (non- state actors)”.

Dari konsep diatas memaparkan bahwa aktor dalam Hubungan Internasional meliputi Negara-negara, organisasi non-pemerintah, serta individu. Pola hubungan internasional ialah suatu interaksi yang saling membutuhkan satu sama lain baik itu kerjasama, persaingan maupun pertentangan, dan yang paling diutamakan disini adalah

suatu hubungan kerjasama dimana hubungan tersebut akan menghasilkan keuntungan terhadap semua pihak yang berkecimpung.

Karen Mingst memberikan jabaran yang lebih luas lagi tentang fungsi Organisasi internasional. Ada beberapa fungsi yang bisa dijalankan oleh Organisasi internasional baik ditingkat internasional, Negara, maupun individu. (Mingst, 1999)

Dalam tingkat internasional, Organisasi Internasional berperan/ berfungsi dalam

1. Memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerja sama diantara Negara/aktor. Dengan adanya Organisasi internasional, diharapkan Negara dapat bersosialisasi secara regular sehingga dapat tercipta suatu kondisi yang dianjurkan oleh kaum fungsionalis.

2. Menyediakan informasi dan pengawasan. Fungsi ini sejalan dengan pemikiran tentang Collective Good, dimana Organisasi Internasional menyediakan informasi, hasil-hasil survey dan pengawasan.

3. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian krisis Yunani yang merupakan isu internasional dan menyita perhatian dunia, terutama Uni Eropa sebagai Organisasi internasional yang sangat memperhatikan persoalan di benua Eropa.

4. Menyediakan arena untuk bargaining bagi Negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah.

Sejak berdirinya organisasi internasional Uni Eropa semua masalah yang berkaitan dengan benua Eropa tidak dapat dilepaskan dari domain fungsi Uni Eropa,

Oleh karena itu setiap masalah yang terjadi di sebuah negara di Eropa yang berkaitan dengan masalah ekonomi maka secara otomatis dunia internasional akan ikut didalamnya.

Krisis yang terjadi di Yunani sudah menjadi isu internasional dan menjadi perhatian bagi organisasi internasional untuk berperan didalamnya. Yunani yang beberapa tahun belakangan mengalami krisis yang sangat mempengaruhi perekonomian Eropa menjadi perhatian khusus bagi Uni Eropa yang merupakan organisasi yang berwenang penuh dalam permasalahan yang terjadi di benua Eropa.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Uni Eropa untuk membantu menyelamatkan Yunani dan negara-negara anggota EU yang menjadi suspect krisis. Pertemuan para petinggi Uni Eropa dilakukan di Brussel, Belgia pada 28-29 Juni 2012. European Council telah berjuang selama 2,5 tahun dengan tujuan agar krisis yang melanda Yunani tidak meluas dan menimbulkan efek buruk di kawasan tersebut.

Jerman dan Perancis berusaha keras mencari solusi menangani krisis Euro. Kanselir Jerman Angela Merkel menyerukan pembentukan kesatuan fiskal Eropa, dan mengatakan tidak ada cara lain untuk menyelesaikan krisis utang Zona Euro. Merkel telah mencoba membujuk Uni Eropa dan mitra Zona Euro untuk menegosiasikan perubahan perjanjian Uni Eropa guna menegakkan disiplin anggaran dan kontrol utang di Zona Euro.

Beberapa point yang dihasilkan dalam Uni Eropa Summit tersebut adalah sebagai berikut:

a. Membentuk pengawas tunggal bagi bank-bank di wilayah Uni Eropa baik itu Bank Sentral Eropa/European Central Bank (ECB) atau badan di bawahnya.

b. Setelah hal itu dilakukan, dua lembaga Eurozone yaitu EFSF (European Financial Stability Facility) dan ESM (European Stability Mechanism), akan dapat merekapitulasi bank-bank secara langsung daripada menyerahkan dana tersebut kepada pemerintah di negara basis bank-bank tersebut. Langkah ini bertujuan untuk menghentikan penumpukan utang bank-bank tersebut kepada pemerintah yang tengah mengalami krisis.

c. Negara-negara Uni Eropa bersepakat bahwa negara-negara yang bekerja untuk mengontrol anggaran mereka, bisa memanfaatkan dana penyelamatan tersebut tanpa perlu melaksanakan langkah-langkah penghematan seperti yang dipaksakan kepada Yunani, Irlandia dan Portugal.

d. Obligasi yang dibeli EFSF/ESM untuk dana penyelamatan Spanyol tidak akan lagi menikmati perlakuan istimewa dibandingkan dengan pemegang obligasi lainnya jika terjadi default. Hal ini dilakukan karena sebelumnya mereka menikmati fasilitas senior bond (senior status) yang secara tidak sengaja, telah menjauhkan investor swasta.

e. Negara-negara Uni Eropa bersepakat untuk melanjutkan negosiasi dalam koridor reformasi jangka panjang untuk Euro, termasuk sertifikat perbankan yang berarti bahwa asuransi Dana Pihak Ketiga Perbankan Eropa terutama deposito

dan pengawasan terhadap bank-bank besar akan ditangani di tingkat Eropa, daripada di tingkat nasional masing-masing negara.

f. Negara-negara Uni Eropa juga menginginkan sertifikat fiskal yang lebih besar sehingga Brussel (Belgia) akan memiliki suara yang lebih besar atas anggaran nasional. Namun begitu, sebagai prasyarat untuk keanggotaan di Eurozone, semua negara telah sepakat untuk membatasi defisit anggaran hingga 3% terhadap PDB dan tingkat utang total tidak lebih dari 60% terhadap PDB.

Apa yang dihasilkan oleh EU Summit ini telah memberikan sentimen positif terhadap pasar. Hal ini tandai dengan hampir semua seluruh pasar (Forex, Indeks, Commodity) mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti mata uang Euro menguat lebih kurang 260 pips daily range terhadap Us Dollar.

3. Teori Structural Adjustment

Menurut Abouharb dan Cingranelli, *Structural Adjustments* adalah perubahan kebijakan yang diterapkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia (*Bretton Woods Institutions*) di negara-negara berkembang. Perubahan kebijakan ini adalah kondisi (persyaratan) untuk mendapatkan pinjaman baru dari IMF atau World Bank, atau untuk memperoleh suku bunga yang lebih rendah atas pinjaman yang ada. Persyaratan diterapkan untuk memastikan bahwa uang yang dipinjamkan akan digunakan sesuai dengan tujuan dari keseluruhan pinjaman. *Structural Adjustment Programs* (SAPs) dibuat dengan tujuan mengurangi ketidak seimbangan fiskal negara peminjam itu. Bank dari Negara peminjam menerima besar pinjaman tergantung dari jenis kebutuhan. SAPs seharusnya memungkinkan perekonomian negara-negara

berkembang untuk menjadi lebih berorientasi pasar. Hal ini kemudian memaksa mereka untuk lebih berkonsentrasi pada perdagangan dan produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka. (Greenberg, 1997)

Pada perkembangannya structural adjustment tidak hanya diterapkan oleh IMF dan Bank Dunia, melainkan telah diadopsi oleh sejumlah lembaga keuangan internasional International Finance Institutions (IFI). Hal ini kemudian diterapkan oleh European Central Bank (ECB) yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter untuk 16 negara yang menggunakan mata uang euro.

Program ini termasuk perubahan internal (terutama privatisasi dan deregulasi) maupun perubahan eksternal, terutama pengurangan hambatan dalam perdagangan. Negara-negara yang gagal untuk menetapkan program-program ini dapat dikenakan disiplin fiskal parah. Beberapa kondisi untuk *Structural Adjustments* atau juga sering juga disebut sebagai *The Washington Consensus* dapat mencakup: (Ibid)

- Memotong pengeluaran, juga dikenal sebagai *Austerity*.
- Fokus output ekonomi terhadap ekspor langsung dan ekstraksi sumberdaya,
- Devaluasi mata uang,
- Liberalisasi perdagangan, peningkatan impor dan pembatasan ekspor,
- Meningkatkan stabilitas investasi (dengan melengkapi investasi langsung asing dengan pembukaan pasar saham domestik),
- Menyeimbangkan anggaran dan tidak *overspending*,
- Menghapus kontrol harga dan subsidi negara,

- Privatisasi, atau pelepasan semua atau bagian dari perusahaan milik negara,
- Meningkatkan hak-hak investor asing vis-a-vis hukum nasional,
- Meningkatkan tata pemerintahan dan memerangi korupsi.

Dalam kaitannya dengan krisis yang terjadi di Yunani, terdapat tiga lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan permasalahan krisis Yunani, yaitu Uni Eropa (UE), International Monetary Funds (IMF) dan European Central Bank (ECB). Hutang Yunani dimulai sejak tahun 1947, dengan banyaknya penggunaan alokasi dana hingga akhirnya gagal membayar hutangnya. Dana pinjaman tersebut terus saja menumpuk, hingga diperkirakan mulai tahun 1993 nilai hutang Yunani telah melampaui GDP-nya. Bahkan saat ini hutang Yunani diperkirakan telah mencapai 120% dari posisi GDP negaranya (Gunawan, 2012). Hingga kemudian memerlukan suntikan dana untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara tersebut, Yunani mengajukan bail out terhadap Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, dan Dana Moneter Internasional. Pada tanggal 2 Mei 2010, IMF akhirnya menyetujui paket bail out (pinjaman) sebesar € 110 milyar untuk Yunani dengan syarat kenaikan pajak dan pemotongan belanja. (Sari, 2016) Yunani juga diberikan konsekuensi-konsekuensi atas bantuan dana talangan tersebut diantaranya:

1. Yunani harus menerapkan kebijakan penghematan yang sistematis (Austerity) dimana hal ini akan memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat Yunani
2. Yunani juga diwajibkan untuk memprivatisasi aset-aset kenegaraan
3. Yunani didesak untuk mereformasi struktur-struktur politiknya.

Economic adjustment program dari IMF tersebut didapatkan melalui KTT Uni Eropa menggunakan pendekatan *implementation problem approach* yaitu dengan melakukan pendekatan yaitu pada pengaturan dan pengawasan sektor keuangan. Kebijakan Fiskal, kebijakan fiskal menjadi sasaran implementasi EAP karena melalui pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang berupa pajak. Serta reformasi dalam sektor labour market dan Product market reforms. (Economy, 2016) Dalam pelaksanaan implementasi *economic adjustment program* dari IMF tidak berjalan dengan baik, dimana setelah bail out yang diajukan pada 2010, ternyata masih belum bisa memulihkan ekonomi dari Yunani. Keadaan ini berujung pada kegagalan Yunani untuk membayar utang sebesar US\$1,7 miliar kepada Dana Moneter Internasional, atau IMF, dengan tenggat waktu yang ditentukan. Menyikapi kondisi darurat utang ini, sejumlah petinggi negara-negara Uni Eropa pun menggelar Emergency Summit di Brussels, Belgia. Mereka meminta Yunani melakukan reformasi keuangan untuk bisa mendapatkan tambahan pinjaman dari kreditor Eropa maupun IMF. Inisiatif yang ditawarkan adalah dengan mengurangi dana pensiun, menaikkan pajak penjualan dan pajak usaha. (Supriadi, 2016) Sehingga disini posisi Yunani berada ditangan IMF dan Uni Eropa, karena IMF dan UE akan memberikan dana talangan atau bantuan terhadap Yunani.

F. Hipotesa

Berdasarkan kerangka teori diatas maka penulis mengambil hipotesa sebagai berikut.

1. Uni Eropa membentuk European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) dan Fasilitas Stabilisasi Keuangan Eropa (European Financial Stability Facility/EFSSF)
2. Uni Eropa meminta Yunani untuk menyetujui Economic Adjustment Programme (Program Penghematan Ekonomi) yang akan ditetapkan oleh Uni Eropa sebagai timbal balik atas pinjaman yang diberikan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini disusun dengan konsep deskriptif analitis. Penulis akan memaparkan data-data dan teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, kemudian dengan konsep dari teori yang telah dipaparkan, data-data tersebut akan dianalisa. Spesifikasi data yang diperlukan dalam menyusun penelitian antara lain yang mendukung. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (Library Research) yaitu dengan menerapkan pola pengolahan data yang diperoleh dari berbagai literatur, media massa, data-data dari berbagai macam website, serta dari berbagai sumber yang mempunyai keterkaitan dan mendukung permasalahan yang ada. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan yang sistematis merupakan salah satu syarat mutlak untuk kaidah penulisan ilmiah, karena itu baik dan buruknya hasil penelitian akan sangat ditentukan oleh bagaimana cara menyajikan hasil penelitian. Adapun sistematika yang terdapat dalam skripsi ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Pokok Permasalahan, Kerangka Teoritik, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, Sistematika Penulisan, Kerangka Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II : FUNGSI KELEMBAGAAN UNI EROPA DALAM MENGHADAPI KRISIS EKONOMI

Pada bab ini akan mendeskripsikan gambaran tentang fungsi-fungsi Uni Eropa dan harapan dengan adanya bantuan Uni Eropa pada anggotanya yang mengalami krisis ekonomi.

BAB III : KRISIS KEUANGAN YUNANI DAN KONDISI EKONOMI EROPA

Pada bab ini akan menjelaskan secara singkat tentang krisis Yunani, dan faktor-faktor major penyebab adanya krisis Yunani

BAB IV : SKEMA BANTUAN UNI EROPA KEPADA YUNANI

Pada bab ini akan dibahas tentang peran Uni Eropa dalam menangani dan membantu Yunani dalam menyelesaikan masalah krisis ekonominya serta kendala-kendala Uni Eropa dalam menanganinya.

BAB V : KESIMPULAN

Di bab ini akan menyimpulkan hasil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dan menjelaskan hasil penelitian ini.